

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Iska Aprilya Wulandari¹, H. Syahrani², Enos Paselle³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program KOTAKU. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, fokus penelitian berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi dan disposisi. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah, sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, Lurah Berbas Tengah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Ketua RT Kelurahan Berbas Tengah dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi Program KOTAKU belum berjalan dengan baik dalam mewujudkan kawasan lingkungan bebas permukiman kumuh dan apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU seperti belum tercapainya sasaran program, terbatasnya koordinasi antar intansi pelaksana tingkat kabupaten/kota dengan kelurahan, tidak adanya monitoring untuk memastikan ketepatan kualitas bantuan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program Kota Tanpa Kumuh, Kelurahan Berbas Tengah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota karena selain merupakan masalah, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak antara pemerintah pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, dan pihak terikat lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kotaku mendukung pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tujuan umum program KOTAKU adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektare melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38,431 hektar skala nasional. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang, maka Kelurahan Berbas Tengah dipilih oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai lokasi direalisasikannya program Kota Tanpa Kumuh, karena masih banyaknya warga yang membuang sampah kelaut sehingga menyebabkan air laut dipenuhi dengan sampah dan berbau tidak sedap. Sanitasi yang buruk pun masih menjadi masalah karena masih adanya warga yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di laut. Masyarakat menganggap bahwa buang sampah dan kotoran manusia secara langsung dilaut tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri.

Adapun menurut wawancara observasi awal dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah masih terdapat kendala lain yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* pelaksana program KOTAKU dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang kepada Kelurahan Berbas Tengah dalam mengimplementasikan program KOTAKU. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kurang mengajak Kelurahan untuk berkontribusi dalam merealisasikan Program KOTAKU.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Anggara 2014: 35), kebijakan publik “*is whatever government chooses to do or not to do*”. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Adapun kebijakan menurut Esthon dalam Suntoro dan Hasan Hariri (2015: 3) adalah “*the authoritative allocation of value for the whole society but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything to government chooses to do or not to do results on the allocation value*”. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah alokasi nilai yang objektif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan menghasilkan alokasi nilai-nilai.

Kemudian Udoji (dalam Wahab, 2016: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*an sationed course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Udoji (dalam Wahab, 2016:15), yang disampaikan oleh Abidin (2004: 23), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012: 149), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149), Grindle (dalam Winarno 2012: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Kemudian menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino 2008: 196) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan

Adapun pengertian Implementasi kebijakan menurut Dunn (2003: 132), ialah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang telah dibuat dan direkomendasikan oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwasanya kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasiannya.

Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah suatu rangkaian pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebijakan program nasional mengenai permukiman kumuh di Kelurahan Berbas Tengah

dimana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari implementasi kebijakan program tersebut yaitu pemerataan pembangunan di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012: 6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.” Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang menggunakan pendekatan *top-down*, berikut ini fokus penelitian yang ditetapkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumberdaya
 - c. Hubungan antar organisasi
 - d. Karakteristik agen pelaksana
 - e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
 - f. Disposisi implementor
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu:

1. Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Berbas Tengah
Selain key informan penulis juga akan mewawancarai informan. Menurut Moleong (2007: 157) mengatakan, “Informan adalah orang

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim didalam penelitian walaupun bersifat informal”. Dan informan yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu:

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang.
 2. Lurah Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 3. Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah
 4. Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Berbas Tengah
 5. Masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah
- a. *Snowball Sampling*

Snowball Sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel ini dipilih satu atau dua orang masyarakat, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Penelitian keperpustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian lapangan (*fieldwork research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk menggali data dan informasi dari sumber data primer tentang implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

Pengumpulan Data

Yaitu merupakan kegiatan awal dalam penelitian berupa pengumpulan data-data mentah dari suatu penelitian.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai standar dan sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa variabel standar kebijakan belum dapat memenuhi variabel model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn karena pemerintah mengharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam bentuk swadaya masyarakat akan tetapi adanya masyarakat yang tidak mau menerima fasilitas bantuan program karena tidak ingin menanggung biaya operasional motor sampah. Kemudian untuk sasaran kebijakan pun belum berjalan dengan baik karena adanya warga yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) langsung ke laut hal tersebut dikarenakan warga yang belum memiliki sanitasi tidak mau menerima bantuan dalam bentuk tangki septik, bantuan yang diberikan tidak seperti yang diinginkan oleh warga dan masih adanya warga dilokasi penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan yang semestinya.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai sumber daya diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum dapat memenuhi variabel sumber daya yang sesuai dengan indikator yang ada dalam teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Sumber daya dalam mendukung implementasi program KOTAKU belum maksimal dikarenakan masih adanya beberapa kendala terutama pada sumber daya fasilitas dan finansial selama bantuan program direalisasikan dan adapapun untuk sumber daya manusia dalam mendukung implementasi program sudah memadai.

Hubungan Antar Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai hubungan antar organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum dapat memenuhi variabel hubungan antar organisasi yang sesuai dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Karena pada kenyataannya hubungan antar organisasi masih belum maksimal dan masih terdapat beberapa kendala

selama program KOTAKU diimplementasikan yaitu masih kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam mengimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah.

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena menurut Van Meter dan Van Horn dalam karakteristik agen pelaksana yang menjadi faktor dalam model implementasi kebijakan mencakup norma-norma, struktur birokrasi dan pola-pola hubungan, pada kenyataannya selama program diimplementasikan tidak adanya bentuk monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan SOP pada petunjuk pelaksanaan program KOTAKU. Pola-pola hubungan dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah telah dijelaskan dalam variabel hubungan antar organisasi yaitu pola hubungan antar organisasi menunjukkan hubungan yang vertikal karena arah hubungan antar organisasi dilihat dari instansi paling atas ke instansi paling bawah. Ditingkat Kabupaten/Kota melalui Satker/Pokja PKP melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah kemudian Fasilitator dikendalikan oleh Tim Korkot untuk melakukan koordinasi ditingkat kelurahan yaitu BKM/LKM dan KSM dikendalikan oleh BKM/LKM.

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis cantumkan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi sosial dan ekonomi dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena menurut Van Meter dan Van Horn adanya dukungan kondisi sosial dan ekonomi sehingga mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, namun pada kenyataannya kondisi sosial masyarakat masih belum berjalan sesuai karena adanya kendala dari masyarakat yang merasa keberatan dengan bantuan perbaikan infrastruktur dan adanya sikap masyarakat yang masih individu. Adapun kondisi ekonomi dapat di katakan sudah sesuai selama program diimplementasikan karena masyarakat yang pengangguran diberdayakan sebagai operator motor sampah yang gajinya didapat melalui iuran warga sebagai bentuk swadaya masyarakat.

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilapangan mengenai disposisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum dapat memenuhi variabel disposisi yang sesuai dengan indikator dalam teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Karena dalam kenyataannya respon, kognisi (pemahaman) dan intensitas masyarakat dalam ikut berpartisipasi masih

kurang dan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mengimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Dalam mengimplementasikan program tentu saja terdapat beberapa faktor penghambat yang dipengaruhi secara internal maupun eksternal. Adapun terdapat beberapa faktor penghambat implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah seperti :

1. Sasaran program masih menjadi faktor penghambat selama program KOTAKU diimplementasikan.
2. Salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Koordinasi juga merupakan salah satu faktor penghambat implementasi program KOTAKU.
4. Hambatan lainnya yaitu tidak adanya bentuk monitoring langsung kelapangan.

Pembahasan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator standar kebijakan belum berjalan dengan baik karena belum sesuai dengan standar program yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat sehingga masih adanya masyarakat yang masih tidak mau menerima bantuan program dalam bentuk motor sampah karena mereka tidak mengetahui bahwa standar implementasi program KOTAKU yaitu harus melibatkan masyarakat juga dalam membiayai operasional motor sampah yang didapat melalui iuran warga.

Kemudian untuk indikator sasaran kebijakan pun belum berjalan dengan baik karena masih adanya warga yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) langsung kelaut, hal tersebut dikarenakan warga dilokasi penerima bantuan yang ada yang tidak memiliki jamban tetapi tidak menerima bantuan tangki septik dari program KOTAKU. Selain itu menurut hasil wawancara diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Berbas Tengah hanya merealisasikan program sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan tidak adanya penampungan aspirasi mengenai kebutuhan dan keinginan secara langsung dari masyarakat oleh instansi terkait dan hanya menjadikan pemerintah pusat sebagai acuan membuat bantuan yang diberikan seperti tangki septik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program KOTAKU sudah memadai baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat

Kelurahan. Adapun staf pelaksana yang terlibat di tingkat Kabupaten/Kota yaitu dalam bentuk Pokja PKP dan ditingkat Kelurahan yaitu terdapat LKM dan KSM yang terlibat langsung di masyarakat.

Adapun untuk sumber daya non manusia berdasarkan indikator sumber daya fasilitas belum memadai dalam mendukung program karena masih adanya bantuan yang direalisasikan seperti tangki septik hasil bantuan kolaborasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Badak LNG dalam bentuk 5 buah tangki septik biofil terdapat masalah yaitu berbau pada saat air laut sedang pasang. Kemudian pemenuhan sumber daya finansial masih belum memadai karena masih adanya kendala seperti yang dijelaskan oleh Lurah Berbas Tengah yaitu adanya keterlambatan pencairan dana ke KSM.

Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi belum berjalan dengan baik karena jika dilihat berdasarkan indikator koordinasi yaitu tidak adanya bentuk koordinasi langsung seperti kegiatan rapat dari instansi pelaksana ditingkat Kabupaten/Kota dengan Kelurahan, dan dalam berkoordinasi dengan instansi pelaksana ditingkat Kelurahan yaitu melalui Koordinator Kota (KORKOT) dan Fasilitator Kelurahan (FASKEL). Tidak adanya koordinasi yang dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk rapat dengan organisasi pelaksana dari kelurahan karena keterbatasan dana anggaran yang tidak menganggarkan adanya pembiayaan untuk rapat.

Selain hubungan antar organisasi pelaksana perlu adanya hubungan organisasi dengan masyarakat berdasarkan indikator komunikasi. Namun jika dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Berbas Tengah bahwa tidak adanya penyampaian informasi dengan jelas dalam bentuk sosialisasi secara luas yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana kepada masyarakat mengenai program KOTAKU.

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator wujud norma-norma dalam mengimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah yaitu adanya bentuk pertanggungjawaban dari instansi pelaksana. Bentuk pertanggungjawaban instansi pelaksana tersebut termuat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

Kemudian untuk Indikator struktur birokrasi yaitu dengan adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang termuat dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU. Didalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU pada tahap keberlanjutan dijelaskan bahwa instansi pelaksana harus melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tidak adanya bentuk monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara langsung kelapangan membuat infrastruktur yang diberikan melalui program KOTAKU tidak terpantau apa saja yang terdapat kekurangan ditengah-tengah masyarakat.

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial, ekonomi masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah selama mengimplementasikan program KOTAKU dapat diketahui bahwa indikator kondisi sosial masyarakat sudah cukup mempengaruhi meskipun terdapat beberapa sikap masyarakat yang sedikit terganggu karena selama perbaikan drainase dan perbaikan jalan menghambat perjalanan mereka hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah berdasarkan data bahwa jumlah penduduk yang tidak tamat SD dan SLTP dengan jumlah yang banyak sehingga masyarakat kurang teredukasi.

Kemudian jika dilihat berdasarkan indikator kondisi ekonomi masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat berpengaruh positif setelah program KOTAKU direalisasikan, karena 7 indikator program KOTAKU mencakup kebutuhan utama masyarakat.

Disposisi

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada indikator respon masyarakat selama implementasi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah menunjukkan bahwa masyarakat merespon dengan antusias meskipun masih adanya masyarakat yang memberikan respon keberatan terhadap perbaikan drainase dan jalan karena masyarakat menganggap bahwa kegiatan perbaikan drainase dan jalan tersebut menghambat akses mereka untuk lewat.

Adapun pada indikator kognisi atau pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga masih adanya masyarakat yang tidak mau menerima bantuan dalam bentuk motor sampah karena tidak ingin menanggung biaya operasional, padahal kondisi perumahan warga yang menerima bantuan berada didaerah pesisir laut yang tentunya sangat membutuhkan bantuan motor sampah agar tidak membuang sampah langsung ke laut.

Indikator Intensitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program KOTAKU dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan drainase dan perbaikan jalan dan intensitas masyarakat hanya dapat dilihat dari pembentukan LKM dan KSM dan adanya bentuk partisipasi masyarakat seperti swadaya masyarakat berupa iuran warga yang disalurkan melalui KSM untuk biaya ongkos pemasangan tangki septik untuk RT 35 dan RT 36 di Kelurahan Berbas Tengah.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

1. Tidak tercapainya tujuan program dalam pengurangan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Kelurahan Berbas Tengah karena bantuan dalam indikator sanitasi seperti pemberian tangki septik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Masyarakat dalam ikut berpartisipasi untuk mengimplementasikan program KOTAKU dilingkungannya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dan masih adanya sikap pamrih mengharapkan gaji dalam bentuk imbalan.
3. Faktor internal yang menyebabkan terbatasnya koordinasi antara tim KOTAKU yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat Kelurahan yaitu karena terbatasnya dana anggaran sehingga dalam mengkoordinasikan antar instansi pelaksana dalam bentuk rapat sangat dibatasi dan tidak adanya penganggaran untuk biaya rapat dengan antar instansi pelaksana adapun hambatan koordinasi dari KSM ke Ketua RT. Kurangnya koordinasi yang dilaksanakan oleh KSM membuat bantuan yang diberikan dari program KOTAKU seperti motor sampah dan motor pemadam kebakaran yang belum dioperasikan.
4. Tidak adanya kegiatan monitoring secara langsung kelapangan menyebabkan masih adanya bantuan seperti tangki septik yang bermasalah tidak terpantau oleh instansi pelaksana. Realisasi bantuan yang seharusnya dapat berguna untuk masyarakat yang belum memiliki jamban dan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan), namun pada kenyataannya bantuan tangki septik tersebut tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya karena masyarakat memilih untuk buang air besar langsung kelaut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan program KOTAKU dirumuskan secara konkrit dan jelas oleh pemerintah pusat sehingga para agen pelaksana ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat kelurahan hanya mengimplementasikan program dari arahan pemerintah pusat dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga masih adanya beberapa sasaran program yang belum tepat sasaran selain itu masih adanya warga yang tidak menerima bantuan sanitasi sehingga tujuan program yaitu BBAS (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) belum tercapai dan berjalan belum sesuai dengan standar program yaitu terciptanya swadaya masyarakat.

- b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program KOTAKU sudah cukup memadai, terdapat beberapa kendala dalam

pemenuhan sumber daya non manusia seperti keterlambatan pencairan dana ke KSM dan masih adanya bantuan dari program seperti tangki septik yang bermasalah sehingga warga masih membuang air besar sembarangan langsung ke laut.

c. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi pelaksana program KOTAKU menunjukkan hubungan yang vertikal. Koordinasi yang dilaksanakan hanya berupa pelatihan LKM, Lurah dan Camat dan tidak adanya koordinasi langsung dalam bentuk rapat, masih adanya kendala dalam koordinasi yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh KSM dengan Ketua RT. Dan tidak adanya bentuk sosialisasi tentang program KOTAKU kepada masyarakat luas sehingga masih adanya warga yang tidak mengetahui secara jelas program KOTAKU.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pertanggungjawaban instansi pelaksana hanya ditunjukkan dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan masih kurangnya sikap nyata instansi pelaksana dalam memecahkan masalah tangki septik yang bermasalah kemudian tidak adanya monitoring dan evaluasi sehingga bantuan yang sudah direalisasikan tidak terpantau apa saja yang belum sesuai harapan.

e. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi implementasi program, dan masih adanya warga yang belum merasakan manfaat dari program yaitu masyarakat yang mendapat bantuan tangki septik dikarenakan bantuan tersebut bermasalah.

f. Disposisi

Respon, kognisi (pemahaman) dalam mengimplementasikan program KOTAKU belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena respon, kognisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi pelaksana dalam mewujudkan tujuan program KOTAKU yaitu terciptanya partisipasi masyarakat, dan intensitas masyarakat hanya terlihat dari adanya iuran warga untuk ongkos pemasangan tangki septik dan tidak adanya bentuk partisipasi dalam pembuatan drainase dan perbaikan jalan.

2. Faktor penghambat implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yaitu tidak tercapainya sasaran program, kurangnya partisipasi masyarakat dan cenderung masih bersikap pamrih. Hambatan lainnya yaitu terbatasnya koordinasi langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan instansi pelaksana ditingkat Kelurahan dikarenakan tidak adanya dana anggaran untuk membiayai rapat koordinasi selain itu, kurangnya koordinasi antara KSM dengan Ketua RT sehingga masih adanya bantuan motor sampah dan motor pemadam kebakaran

yang belum dioperasionalkan. Tidak adanya monitoring langsung lapangan juga merupakan hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan adanya bantuan tangki septik yang bermasalah dan tidak terpantau oleh instansi pelaksana.

Saran

1. Instansi pelaksana program KOTAKU ditingkat Kabupaten/Kota lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat sebelum memberikan bantuan dan tidak hanya menjalankan program dari arahan pemerintah pusat tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
2. Instansi pelaksana program KOTAKU lebih memberikan pemahaman seperti sosialisasi kepada masyarakat bahwa tujuan dari program adalah keterlibatan masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya dana anggaran yang dikhususkan untuk membiayai rapat antar organisasi agar koordinasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan LKM dan KSM secara langsung dapat terlaksana dengan baik.
4. Lebih meningkatkan koordinasi antara KSM dengan Ketua RT sehingga menyadari bahwa bantuan dari hasil realisasi program adalah tanggung jawab bersama dan bantuan tersebut dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya.
5. Perlu adanya kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana secara langsung ke lapangan dan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh.
6. Perlu adanya studi banding dengan Kelurahan lain yang menerima bantuan program KOTAKU dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suntoro, Irawan M.S., dan Hasan Hariri, Ph.D.2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Dokumen:

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang